



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 169/PMK.07/2007

TENTANG

PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA
SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Perkiraan Alokasi Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Pusat Yang Dibagikan Kepada Seluruh Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

6. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN PERKIRAAN ALOKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1

Penerimaan negara dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi dengan imbangan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Pusat dan 90% (sembilan puluh persen) untuk daerah.

Pasal 2

- (1) Penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dialokasikan kepada seluruh kabupaten dan kota.
- (2) Alokasi untuk kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut:
 - a. 6,5% (enam lima persepuluh persen) dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten dan kota; dan
 - b. 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dibagikan sebagai insentif kepada kabupaten dan/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2008 merupakan perkiraan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas rencana penerimaan PBB dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008.
- (3) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar Rp1.570.380.499.742,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh miliar tiga ratus delapan puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh dua rupiah).

Pasal 4

- (1) Perkiraan alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b didasarkan pada prognosa realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran alokasi PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yang dibagikan kepada seluruh kabupaten dan kota dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap, yaitu tahap I pada bulan April, tahap II pada bulan Agustus, dan tahap III pada bulan November tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran alokasi penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) yang dibagikan sebagai insentif sebesar 3,5% (tiga lima persepuluh persen) dialokasikan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan pada tahap III bulan November tahun anggaran berjalan.
- (3) Penyaluran Dana Bagi Hasil PBB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 6

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2007

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

Kepala Biro Umum dan T.U. Departemen



Antonius Suharto

60041107



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 169/PMK.07/2007 TENTANG PENETAPAN
PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN
KE SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN
2008

**PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KE SELURUH
KABUPATEN DAN KOTA
TAHUN ANGGARAN 2008**

dalam rupiah

NO	DAERAH	PBB
I	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	
1	Kab. Aceh Barat	3.443.816.885
2	Kab. Aceh Besar	3.443.816.885
3	Kab. Aceh Selatan	3.443.816.885
4	Kab. Aceh Singkil	3.443.816.885
5	Kab. Aceh Tengah	3.443.816.885
6	Kab. Aceh Tenggara	3.443.816.885
7	Kab. Aceh Timur	3.443.816.885
8	Kab. Aceh Utara	3.443.816.885
9	Kab. Bireuen	3.443.816.885
10	Kab. Aceh Pidie	3.443.816.885
11	Kab. Simeuleu	3.443.816.885
12	Kota Banda Aceh	3.443.816.885
13	Kota Sabang	3.443.816.885
14	Kota Langsa	3.443.816.885
15	Kota Lhokseumawe	3.443.816.885
16	Kab. Nagan Raya	3.443.816.885
17	Kab. Aceh Jaya	3.443.816.885
18	Kab. Aceh Barat Daya	3.443.816.885
19	Kab. Gayo Lues	3.443.816.885
20	Kab. Aceh Tamiang	3.443.816.885
21	Kab. Bener Meriah	3.443.816.885
22	Kab. Pidie Jaya **	3.443.816.885
23	Kota Subulussalam **	3.443.816.885
II	Provinsi Sumatera Utara	
1	Kab. Asahan	3.443.816.885
2	Kab. Dairi	3.443.816.885
3	Kab. Deli Serdang	3.443.816.885
4	Kab. Tanah Karo	3.443.816.885



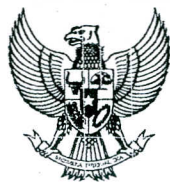
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
5	Kab. Labuhan Batu	3.443.816.885
6	Kab. Langkat	3.443.816.885
7	Kab. Mandailing Natal	3.443.816.885
8	Kab. Nias	3.443.816.885
9	Kab. Simalungun	3.443.816.885
10	Kab. Tapanuli Selatan	3.443.816.885
11	Kab. Tapanuli Tengah	3.443.816.885
12	Kab. Tapanuli Utara	3.443.816.885
13	Kab. Toba Samosir	3.443.816.885
14	Kota Binjai	3.443.816.885
15	Kota Medan	3.443.816.885
16	Kota Pematang Siantar	3.443.816.885
17	Kota Sibolga	3.443.816.885
18	Kota Tanjung Balai	3.443.816.885
19	Kota Tebing Tinggi	3.443.816.885
20	Kota Padang Sidempuan	3.443.816.885
21	Kab. Pakpak Bharat	3.443.816.885
22	Kab. Nias Selatan	3.443.816.885
23	Kab. Humbang Hasundutan	3.443.816.885
24	Kab. Serdang Berdagai	3.443.816.885
25	Kab. Samosir	3.443.816.885
26	Kab. Batu Bara **	3.443.816.885
III	Provinsi Sumatera Barat	
1	Kab. Limapuluh Koto	3.443.816.885
2	Kab. Agam	3.443.816.885
3	Kab. Kepulauan Mentawai	3.443.816.885
4	Kab. Padang Pariaman	3.443.816.885
5	Kab. Pasaman	3.443.816.885
6	Kab. Pesisir Selatan	3.443.816.885
7	Kab. Sawahlunto Sijunjung	3.443.816.885
8	Kab. Solok	3.443.816.885
9	Kab. Tanah Datar	3.443.816.885
10	Kota Bukit Tinggi	3.443.816.885
11	Kota Padang Panjang	3.443.816.885
12	Kota Padang	3.443.816.885
13	Kota Payakumbuh	3.443.816.885
14	Kota Sawahlunto	3.443.816.885
15	Kota Solok	3.443.816.885
16	Kota Pariaman	3.443.816.885
17	Kab. Pasaman Barat	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
18	Kab. Dharmasraya	3.443.816.885
19	Kab. Solok Selatan	3.443.816.885
IV	Provinsi Riau	
1	Kab. Bengkalis	3.443.816.885
2	Kab. Indragiri Hilir	3.443.816.885
3	Kab. Indragiri Hulu	3.443.816.885
4	Kab. Kampar	3.443.816.885
5	Kab. Kuantan Singingi	3.443.816.885
6	Kab. Pelalawan	3.443.816.885
7	Kab. Rokan Hilir	3.443.816.885
8	Kab. Rokan Hulu	3.443.816.885
9	Kab. Siak	3.443.816.885
10	Kota Dumai	3.443.816.885
11	Kota Pekanbaru	3.443.816.885
V	Provinsi Riau Kepulauan	
1	Kab. Kepulauan Riau	3.443.816.885
2	Kab. Natuna	3.443.816.885
3	Kab. Karimun	3.443.816.885
4	Kota Batam	3.443.816.885
5	Kota Tanjung Pinang	3.443.816.885
6	Kab. Lingga	3.443.816.885
VI	Provinsi Jambi	
1	Kab. Batanghari	3.443.816.885
2	Kab. Bungo	3.443.816.885
3	Kab. Kerinci	3.443.816.885
4	Kab. Merangin	3.443.816.885
5	Kab. Muaro Jambi	3.443.816.885
6	Kab. Sarolangun	3.443.816.885
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.443.816.885
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	3.443.816.885
9	Kab. Tebo	3.443.816.885
10	Kota Jambi	3.443.816.885
VII	Provinsi Sumatera Selatan	
1	Kab. Lahat	3.443.816.885
2	Kab. Musi Banyuasin	3.443.816.885
3	Kab. Musi Rawas	3.443.816.885
4	Kab. Muara Enim	3.443.816.885
5	Kab. Ogan Komering Ilir	3.443.816.885
6	Kab. Ogan Komering Ulu	3.443.816.885
7	Kota Palembang	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
8	Kota Pagar Alam	3.443.816.885
9	Kota Lubuk Linggau	3.443.816.885
10	Kota Prabumulih	3.443.816.885
11	Kab. Banyuasin	3.443.816.885
12	Kab. Ogan Ilir	3.443.816.885
13	Kab. OKU Timur	3.443.816.885
14	Kab. OKU Selatan	3.443.816.885
15	Kab. Empat Lawang **	3.443.816.885
VIII	Provinsi Bangka Belitung	
1	Kab. Bangka	3.443.816.885
2	Kab. Belitung	3.443.816.885
3	Kota Pangkal Pinang	3.443.816.885
4	Kab. Bangka Selatan	3.443.816.885
5	Kab. Bangka Tengah	3.443.816.885
6	Kab. Bangka Barat	3.443.816.885
7	Kab. Belitung Timur	3.443.816.885
IX	Provinsi Bengkulu	
1	Kab. Bengkulu Selatan	3.443.816.885
2	Kab. Bengkulu Utara	3.443.816.885
3	Kab. Rejang Lebong	3.443.816.885
4	Kota Bengkulu	3.443.816.885
5	Kab. Kaur	3.443.816.885
6	Kab. Seluma	3.443.816.885
7	Kab. Mukomuko	3.443.816.885
8	Kab. Lebong	3.443.816.885
9	Kab. Kepahiang	3.443.816.885
X	Provinsi Lampung	
1	Kab. Lampung Barat	3.443.816.885
2	Kab. Lampung Selatan	3.443.816.885
3	Kab. Lampung Tengah	3.443.816.885
4	Kab. Lampung Utara	3.443.816.885
5	Kab. Lampung Timur	3.443.816.885
6	Kab. Tanggamus	3.443.816.885
7	Kab. Tulang Bawang	3.443.816.885
8	Kab. Way Kanan	3.443.816.885
9	Kota Bandar Lampung	3.443.816.885
10	Kota Metro	3.443.816.885
XI	Provinsi DKI Jakarta	17.219.084.427
XII	Provinsi Jawa Barat	
1	Kab. Bandung	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
2	Kab. Bekasi	3.443.816.885
3	Kab. Bogor	3.443.816.885
4	Kab. Ciamis	3.443.816.885
5	Kab. Cianjur	3.443.816.885
6	Kab. Cirebon	3.443.816.885
7	Kab. Garut	3.443.816.885
8	Kab. Indramayu	3.443.816.885
9	Kab. Karawang	3.443.816.885
10	Kab. Kuningan	3.443.816.885
11	Kab. Majalengka	3.443.816.885
12	Kab. Purwakarta	3.443.816.885
13	Kab. Subang	3.443.816.885
14	Kab. Sukabumi	3.443.816.885
15	Kab. Sumedang	3.443.816.885
16	Kab. Tasikmalaya	3.443.816.885
17	Kota Bandung	3.443.816.885
18	Kota Bekasi	3.443.816.885
19	Kota Bogor	3.443.816.885
20	Kota Cirebon	3.443.816.885
21	Kota Depok	3.443.816.885
22	Kota Sukabumi	3.443.816.885
23	Kota Cimahi	3.443.816.885
24	Kota Tasikmalaya	3.443.816.885
25	Kota Banjar	3.443.816.885
26	Kab. Bandung Barat **	3.443.816.885
XIII	Provinsi Banten	
1	Kab. Lebak	3.443.816.885
2	Kab. Pandeglang	3.443.816.885
3	Kab. Serang	3.443.816.885
4	Kab. Tangerang	3.443.816.885
5	Kota Cilegon	3.443.816.885
6	Kota Tangerang	3.443.816.885
XIV	Provinsi Jawa Tengah	
1	Kab. Banjarnegara	3.443.816.885
2	Kab. Banyumas	3.443.816.885
3	Kab. Batang	3.443.816.885
4	Kab. Blora	3.443.816.885
5	Kab. Boyolali	3.443.816.885
6	Kab. Brebes	3.443.816.885
7	Kab. Cilacap	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
8	Kab. Demak	3.443.816.885
9	Kab. Grobogan	3.443.816.885
10	Kab. Jepara	3.443.816.885
11	Kab. Karanganyar	3.443.816.885
12	Kab. Kebumen	3.443.816.885
13	Kab. Kendal	3.443.816.885
14	Kab. Klaten	3.443.816.885
15	Kab. Kudus	3.443.816.885
16	Kab. Magelang	3.443.816.885
17	Kab. Pati	3.443.816.885
18	Kab. Pekalongan	3.443.816.885
19	Kab. Pemalang	3.443.816.885
20	Kab. Purbalingga	3.443.816.885
21	Kab. Purworejo	3.443.816.885
22	Kab. Rembang	3.443.816.885
23	Kab. Semarang	3.443.816.885
24	Kab. Sragen	3.443.816.885
25	Kab. Sukoharjo	3.443.816.885
26	Kab. Tegal	3.443.816.885
27	Kab. Temanggung	3.443.816.885
28	Kab. Wonogiri	3.443.816.885
29	Kab. Wonosobo	3.443.816.885
30	Kota Magelang	3.443.816.885
31	Kota Pekalongan	3.443.816.885
32	Kota Salatiga	3.443.816.885
33	Kota Semarang	3.443.816.885
34	Kota Surakarta	3.443.816.885
35	Kota Tegal	3.443.816.885
XV	Provinsi DI Yogyakarta	
1	Kab. Bantul	3.443.816.885
2	Kab. Gunung Kidul	3.443.816.885
3	Kab. Kulon Progo	3.443.816.885
4	Kab. Sleman	3.443.816.885
5	Kota Yogyakarta	3.443.816.885
XVI	Provinsi Jawa Timur	
1	Kab. Bangkalan	3.443.816.885
2	Kab. Banyuwangi	3.443.816.885
3	Kab. Blitar	3.443.816.885
4	Kab. Bojonegoro	3.443.816.885
5	Kab. Bondowoso	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
6	Kab. Gresik	3.443.816.885
7	Kab. Jember	3.443.816.885
8	Kab. Jombang	3.443.816.885
9	Kab. Kediri	3.443.816.885
10	Kab. Lamongan	3.443.816.885
11	Kab. Lumajang	3.443.816.885
12	Kab. Madiun	3.443.816.885
13	Kab. Magetan	3.443.816.885
14	Kab. Malang	3.443.816.885
15	Kab. Mojokerto	3.443.816.885
16	Kab. Nganjuk	3.443.816.885
17	Kab. Ngawi	3.443.816.885
18	Kab. Pacitan	3.443.816.885
19	Kab. Pamekasan	3.443.816.885
20	Kab. Pasuruan	3.443.816.885
21	Kab. Ponorogo	3.443.816.885
22	Kab. Probolinggo	3.443.816.885
23	Kab. Sampang	3.443.816.885
24	Kab. Sidoarjo	3.443.816.885
25	Kab. Situbondo	3.443.816.885
26	Kab. Sumenep	3.443.816.885
27	Kab. Trenggalek	3.443.816.885
28	Kab. Tuban	3.443.816.885
29	Kab. Tulungagung	3.443.816.885
30	Kota Blitar	3.443.816.885
31	Kota Kediri	3.443.816.885
32	Kota Madiun	3.443.816.885
33	Kota Malang	3.443.816.885
34	Kota Mojokerto	3.443.816.885
35	Kota Pasuruan	3.443.816.885
36	Kota Probolinggo	3.443.816.885
37	Kota Surabaya	3.443.816.885
38	Kota Batu	3.443.816.885
XVII	Provinsi Kalimantan Barat	
1	Kab. Bengkayang	3.443.816.885
2	Kab. Landak	3.443.816.885
3	Kab. Kapuas Hulu	3.443.816.885
4	Kab. Ketapang	3.443.816.885
5	Kab. Pontianak	3.443.816.885
6	Kab. Sambas	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
7	Kab. Sanggau	3.443.816.885
8	Kab. Sintang	3.443.816.885
9	Kota Pontianak	3.443.816.885
10	Kota Singkawang	3.443.816.885
11	Kab. Sekadau	3.443.816.885
12	Kab. Melawi	3.443.816.885
13	Kab. Kayong Utara **	3.443.816.885
XVIII	Provinsi Kalimantan Tengah	
1	Kab. Barito Selatan	3.443.816.885
2	Kab. Barito Utara	3.443.816.885
3	Kab. Kapuas	3.443.816.885
4	Kab. Kotawaringin Barat	3.443.816.885
5	Kab. Kotawaringin Timur	3.443.816.885
6	Kota Palangkaraya	3.443.816.885
7	Kab. Barito Timur	3.443.816.885
8	Kab. Murung Raya	3.443.816.885
9	Kab. Pulang Pisau	3.443.816.885
10	Kab. Gunung Mas	3.443.816.885
11	Kab. Lamandau	3.443.816.885
12	Kab. Sukamara	3.443.816.885
13	Kab. Katingan	3.443.816.885
14	Kab. Seruyan	3.443.816.885
XIX	Provinsi Kalimantan Selatan	
1	Kab. Banjar	3.443.816.885
2	Kab. Barito Kuala	3.443.816.885
3	Kab. Hulu Sungai Selatan	3.443.816.885
4	Kab. Hulu Sungai Tengah	3.443.816.885
5	Kab. Hulu Sungai Utara	3.443.816.885
6	Kab. Kota Baru	3.443.816.885
7	Kab. Tabalong	3.443.816.885
8	Kab. Tanah Laut	3.443.816.885
9	Kab. Tapin	3.443.816.885
10	Kota Banjar Baru	3.443.816.885
11	Kota Banjarmasin	3.443.816.885
12	Kab. Balangan	3.443.816.885
13	Kab. Tanah Bumbu	3.443.816.885
XX	Provinsi Kalimantan Timur	
1	Kab. Berau	3.443.816.885
2	Kab. Bulungan	3.443.816.885
3	Kab. Kutai Kartanegara	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
4	Kab. Kutai Barat	3.443.816.885
5	Kab. Kutai Timur	3.443.816.885
6	Kab. Malinau	3.443.816.885
7	Kab. Nunukan	3.443.816.885
8	Kab. Pasir	3.443.816.885
9	Kota Balikpapan	3.443.816.885
10	Kota Bontang	3.443.816.885
11	Kota Samarinda	3.443.816.885
12	Kota Tarakan	3.443.816.885
13	Kab. Penajam Paser Utara	3.443.816.885
XXI	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kab. Bolaang Mongondow	3.443.816.885
2	Kab. Minahasa	3.443.816.885
3	Kab. Sangihe	3.443.816.885
4	Kota Bitung	3.443.816.885
5	Kota Manado	3.443.816.885
6	Kab. Kepulauan Talaud	3.443.816.885
7	Kab. Minahasa Selatan	3.443.816.885
8	Kota Tomohon	3.443.816.885
9	Kab. Minahasa Utara	3.443.816.885
10	Kota Kotamubagu **	3.443.816.885
11	Kab. Bolaang Mongondow Utara **	3.443.816.885
12	Kab. Kep. Sitaro **	3.443.816.885
13	Kab. Minahasa Tenggara **	3.443.816.885
XXII	Provinsi Gorontalo	
1	Kab. Boalemo	3.443.816.885
2	Kab. Gorontalo	3.443.816.885
3	Kota Gorontalo	3.443.816.885
4	Kab. Pohuwato	3.443.816.885
5	Kab. Bone Bolango	3.443.816.885
6	Kab. Gorontalo Utara **	3.443.816.885
XXIII	Provinsi Sulawesi Tengah	
1	Kab. Banggai	3.443.816.885
2	Kab. Banggai Kepulauan	3.443.816.885
3	Kab. Buol	3.443.816.885
4	Kab. Toli-Toli	3.443.816.885
5	Kab. Donggala	3.443.816.885
6	Kab. Morowali	3.443.816.885
7	Kab. Poso	3.443.816.885
8	Kota Palu	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
9	Kab. Parigi Moutong	3.443.816.885
10	Kab. Tojo Una Una	3.443.816.885
XXIV	Provinsi Sulawesi Selatan	
1	Kab. Bantaeng	3.443.816.885
2	Kab. Barru	3.443.816.885
3	Kab. Bone	3.443.816.885
4	Kab. Bulukumba	3.443.816.885
5	Kab. Enrekang	3.443.816.885
6	Kab. G o w a	3.443.816.885
7	Kab. Jeneponto	3.443.816.885
8	Kab. Luwu	3.443.816.885
9	Kab. Luwu Utara	3.443.816.885
10	Kab. M a r o s	3.443.816.885
11	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.443.816.885
12	Kab. Pinrang	3.443.816.885
13	Kab. Selayar	3.443.816.885
14	Kab. Sidenreng Rappang	3.443.816.885
15	Kab. Sinjai	3.443.816.885
16	Kab. Soppeng	3.443.816.885
17	Kab. Takalar	3.443.816.885
18	Kab. Tana Toraja	3.443.816.885
19	Kab. Wajo	3.443.816.885
20	Kota Pare-pare	3.443.816.885
21	Kota Makassar	3.443.816.885
22	Kota Palopo	3.443.816.885
23	Kab. Luwu Timur	3.443.816.885
XXV	Provinsi Sulawesi Barat	
1	Kab. Majene	3.443.816.885
2	Kab. Mamuju	3.443.816.885
3	Kab. Polewali Marnasa	3.443.816.885
4	Kab. Mamasa	3.443.816.885
5	Kab. Mamuju Utara	3.443.816.885
XXVI	Provinsi Sulawesi Tenggara	
1	Kab. Buton	3.443.816.885
2	Kab. Konawe	3.443.816.885
3	Kab. Kolaka	3.443.816.885
4	Kab. Muna	3.443.816.885
5	Kota Kendari	3.443.816.885
6	Kota Bau-bau	3.443.816.885
7	Kab. Konawe Selatan	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
8	Kab. Bombana	3.443.816.885
9	Kab. Wakatobi	3.443.816.885
10	Kab. Kolaka Utara	3.443.816.885
11	Kab. Konawe Utara **	3.443.816.885
12	Kab. Buton Utara **	3.443.816.885
XXVII	Provinsi Bali	
1	Kab. Badung	3.443.816.885
2	Kab. Bangli	3.443.816.885
3	Kab. Buleleng	3.443.816.885
4	Kab. Gianyar	3.443.816.885
5	Kab. Jembrana	3.443.816.885
6	Kab. Karangasem	3.443.816.885
7	Kab. Klungkung	3.443.816.885
8	Kab. Tabanan	3.443.816.885
9	Kota Denpasar	3.443.816.885
XXVIII	Provinsi Nusa Tenggara Barat	
1	Kab. Bima	3.443.816.885
2	Kab. Dompu	3.443.816.885
3	Kab. Lombok Barat	3.443.816.885
4	Kab. Lombok Tengah	3.443.816.885
5	Kab. Lombok Timur	3.443.816.885
6	Kab. Sumbawa	3.443.816.885
7	Kota Mataram	3.443.816.885
8	Kota Bima	3.443.816.885
9	Kab. Sumbawa Barat	3.443.816.885
XXIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur	
1	Kab. Alor	3.443.816.885
2	Kab. Belu	3.443.816.885
3	Kab. Ende	3.443.816.885
4	Kab. Flores Timur	3.443.816.885
5	Kab. Kupang	3.443.816.885
6	Kab. Lembata	3.443.816.885
7	Kab. Manggarai	3.443.816.885
8	Kab. Ngada	3.443.816.885
9	Kab. Sikka	3.443.816.885
10	Kab. Sumba Barat	3.443.816.885
11	Kab. Sumba Timur	3.443.816.885
12	Kab. Timor Tengah Selatan	3.443.816.885
13	Kab. Timor Tengah Utara	3.443.816.885
14	Kota Kupang	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
15	Kab. Rote Ndao	3.443.816.885
16	Kab. Manggarai Barat	3.443.816.885
17	Kab. Nagekeo **	3.443.816.885
18	Kab. Sumba Barat Daya **	3.443.816.885
19	Kab. Sumba Tengah **	3.443.816.885
XXX	Provinsi Maluku	
1	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.443.816.885
2	Kab. Maluku Tengah	3.443.816.885
3	Kab. Maluku Tenggara	3.443.816.885
4	Kab. Pulau Buru	3.443.816.885
5	Kota Ambon	3.443.816.885
6	Kab. Seram Bagian Barat	3.443.816.885
7	Kab. Seram Bagian Timur	3.443.816.885
8	Kab. Kepulauan Aru	3.443.816.885
XXXI	Provinsi Maluku Utara	
1	Kab. Halmahera Tengah	3.443.816.885
2	Kab. Halmahera Barat	3.443.816.885
3	Kota Ternate	3.443.816.885
4	Kab. Halmahera Timur	3.443.816.885
5	Kota Tidore Kepulauan	3.443.816.885
6	Kab. Kepulauan Sula	3.443.816.885
7	Kab. Halmahera Selatan	3.443.816.885
8	Kab. Halmahera Utara	3.443.816.885
XXXII	Provinsi Papua	
1	Kab. Biak Numfor	3.443.816.885
2	Kab. Jayapura	3.443.816.885
3	Kab. Jayawijaya	3.443.816.885
4	Kab. Merauke	3.443.816.885
5	Kab. Mimika	3.443.816.885
6	Kab. Nabire	3.443.816.885
7	Kab. Paniai	3.443.816.885
8	Kab. Puncak Jaya	3.443.816.885
9	Kab. Yapen Waropen	3.443.816.885
10	Kota Jayapura	3.443.816.885
11	Kab. Sarmi	3.443.816.885
12	Kab. Keerom	3.443.816.885
13	Kab. Yahukimo	3.443.816.885
14	Kab. Pegunungan Bintang	3.443.816.885
15	Kab. Tolikara	3.443.816.885
16	Kab. Boven Digoel	3.443.816.885



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NO	DAERAH	PBB
17	Kab. Mappi	3.443.816.885
18	Kab. Asmat	3.443.816.885
19	Kab. Waropen	3.443.816.885
20	Kab. Supiori	3.443.816.885
21	Kab. Mamberamo Raya **	3.443.816.885
XXXIII	Provinsi Irian Jaya Barat	
1	Kab. Sorong	3.443.816.885
2	Kab. Manokwari	3.443.816.885
3	Kab. Fak Fak	3.443.816.885
4	Kota Sorong	3.443.816.885
5	Kab. Sorong Selatan	3.443.816.885
6	Kab. Raja Ampat	3.443.816.885
7	Kab. Teluk Bintuni	3.443.816.885
8	Kab. Teluk Wondama	3.443.816.885
9	Kab. Kaimana	3.443.816.885
Total Kabupaten / Kota		1.570.380.499.742

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum

Kepala Biro Umum T.U. Departemen



Antonius Suharto
060041107